

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEMISKINAN

Eddy Winarso¹

¹Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

Penulis korespondensi: edi.winarso@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kinerja perekonomian untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat menjadi sejahtera. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir disemua negara berkembang. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif salah satu cara yaitu mengubah proposi belanja yang dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung agar tingkat kemiskinan menurun. Objek penelitian adalah pemerintah kabupaten / kota Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sample 123 secara purposive diperoleh bahwa belanja langsung berpengaruh terhadap kemiskinan sebesar -2,066, dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan sebesar 6,524 dan serta secara bersamaan belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

KATA KUNCI

kemiskinan, belanja langsung, belanja tidak langsung

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan merupakan salah satu akar permasalahan dari masalah rendahnya pembangunan di Indonesia (Misdawita & Sari, 2013).

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah (Hasan & Zikriah, 2006).

Menurut Mankiw, *et al* (2012: 445) kemiskinan adalah salah satu dari masalah yang sangat sulit dihadapi oleh pembuat kebijakan. Keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Anggota keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan. Walaupun sulit untuk memisahkan penyebab-penyebab kemiskinan dari efek-efek ini, tidak diragukan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai penyakit ekonomi dan sosial.

Kemiskinan dan ketidakadilan masih banyak terjadi di negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Persoalan ini boleh dikatakan belum terpecahkan secara tuntas. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan di Indonesia, kemiskinan dan ketidakadilan (serta pengangguran) merupakan isu-isu sosial ekonomi yang selalu aktual untuk diperbincangkan (Brata, 2003: 66).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada semester 2 (September 2015) 2.706.520 jiwa yang merupakan jumlah penduduk miskin perkotaan tertinggi provinsi di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 1.789.570 jiwa dan Provinsi Jawa Timur 1.571.150 jiwa. Data pada Semester 2 (September 2014) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan di Provinsi Jawa Barat masih yang tertinggi dengan angka 2.554.060 jiwa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 1.771.530 jiwa dan Jawa Timur 1.531.890 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada Semester 2 (September 2013) 4.382.650 jiwa dan mengalami peningkatan sehingga pada semester 2 (September 2015) jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.485.650 jiwa.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik (Setyowati & Suparwati, 2012).

Provinsi Jawa Barat mempunyai 11 prioritas pembangunan dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Menurut (Misdawita & Sari, 2013) bahwa aspek pengeluaran adalah aspek yang krusial bagi pemerintah sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Belanja Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 2) Seberapa besar pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 3) Seberapa besar pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji pengaruh Belanja Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Menguji pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- 3) Menguji pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Chamber yang dikutip dalam (Suradi, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Amartya Sen dalam (Suradi, 2007) mengungkapkan bahwa terdapat inti dari absolut kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam pendidikan serta perawatan kesehatan.

Tingkat kemiskinan adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut. Garis kemiskinan ditentukan oleh pemerintah dan disesuaikan sekitar setiap tahun untuk menjelaskan perubahan pada tingkat harga dan tergantung pada ukuran keluarga (Mankiw, *et al*, 2012: 438).

Menurut (Suradi, 2007) pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlakunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*fundamental needs*). Bagian dari standar hidup bukan barang atau sifatnya, melainkan kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan menggunakan barang atau pelayanan tersebut. Kemiskinan adalah suatu pemikiran yang absolut dalam lingkup kemampuan, tetapi seringkali mengambil bentuk relatif dalam lingkup komoditas atau sifat.

Menurut Freeman, *et al.* (2006: 217) belanja, konsep yang berbeda daripada beban, adalah sebuah ukuran dari dana kewajiban yang dikeluarkan selama periode dari operasional pemerintahan, pengeluaran modal, dan hutang. Belanja pemerintah dapat didefinisikan sebagai akuntansi dana di mana semua penurunan dana aset bersih untuk kegiatan rutin operasional pemerintah, pengeluaran modal, dan hutang kecuali yang terjadi dari transfer ke dana lainnya. Belanja merupakan penurunan aset dana aset bersih yang tidak dihasilkan dari transfer dan pengembalian transaksi. Ukuran dari suatu belanja adalah dana kewajiban yang cepat cair dengan sumber daya saat ini (Granof, 2007).

Menurut Abdul Halim (2007: 100) belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

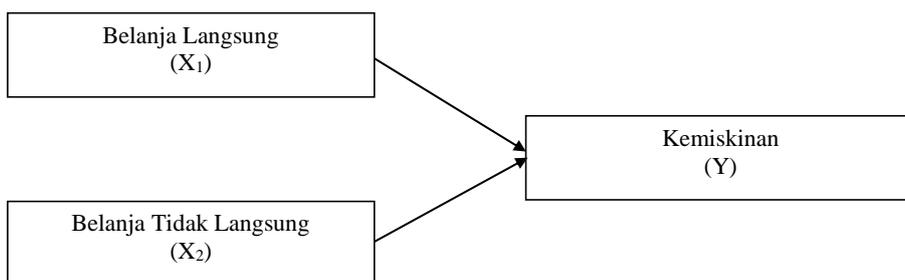
Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Belanja Langsung berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- H₂: Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- H₃: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Pemerintah Kabupaten/Kota dan populasi sarannya adalah 25 Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Arikunto (2013: 183) *purposive sample* adalah sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu di mana dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dikarenakan jumlah penduduk miskin perkotaan di Provinsi Jawa Barat lebih besar daripada Provinsi lainnya di Indonesia.

Data dalam penelitian ini meliputi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penduduk miskin dimana data tersebut dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi di mana mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2013: 52). Di dalam penelitian ini variabel dependen adalah kemiskinan serta variabel independen adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Ghozali & Ratmono (2013: 231) data panel sering disebut *pooled data* (*pooling time series* dan *cross-section*) dapat didefinisikan sebagai *dataset* di mana perilaku unit *cross-sectional* diamati sepanjang waktu.



Gambar 1. Hubungan Struktur X₁, X₂ terhadap Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	66030.881	15998.319		4.127	.000
	Belanja Langsung	-5.1E-008	.000	-.202	-2.066	.040
	Belanja Tidak Langsung	1.63E-007	.000	.639	6.524	.000

a. Dependent Variable: Penduduk Miskin

Nilai t_{tabel} dilihat pada taraf signifikansi 0,05 dan $df = \text{jumlah sampel} - \text{variabel bebas} = 125 - 2 = 123$. Oleh karena itu, nilai t_{tabel} pada $df = 123$ adalah -1,65734. Nilai t_{hitung} diperoleh pada tabel 1 yaitu -2,066 yang berarti $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,066 < -1,65734$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima yang memberikan kesimpulan bahwa variabel Belanja Langsung berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan.

Penelitian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh (Misdawita & Sari, 2013) bahwa pengeluaran pemerintah yang salah satunya di bidang pendidikan sudah tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat miskin, maka akan meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu masuk ke lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja langsung yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka kemiskinan akan berkurang dikarenakan dalam bentuk belanja langsung pengeluaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat menstimulus produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah (Sasana, 2012).

Nilai t_{tabel} dilihat pada taraf signifikansi 0,05 dan $df = \text{jumlah sampel} - \text{variabel bebas} = 125 - 2 = 123$. Oleh karena itu, nilai t_{tabel} pada $df = 123$ adalah 1,65734. Nilai t_{hitung} diperoleh pada tabel 1 yaitu 6,524 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,524 > 1,65734$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima yang memberikan kesimpulan bahwa variabel Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan.

Menurut (Sasana, 2012) secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini apabila belanja tidak langsung meningkat, maka kemiskinan pun akan meningkat. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Minggu, Rumat, & Rotinsulu, 2016) bahwa semakin belanja tidak langsung diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan. Secara bersama sama belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

$$Y = 4,127 - 2,066 X_1 + 6,524 X_2 + \epsilon_0 \text{ atau}$$

$$\text{Kemiskinan} = 4,127 - 2,066 \text{ Belanja Langsung} + 6,524 \text{ Belanja tidak langsung} + \epsilon_0$$

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penulis memberikan saran yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sehingga generalisasi hasil penelitian dan pembahasan kurang dapat diberlakukan bagi provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang agar dapat memperluas serta menambah sampel penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat.

REFERENSI

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, T. I. Ben, & Zikriah. (2006). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Riset Ekonomi*, 2, 97–105.
- Minggu, T. D., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Misdawita, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161. <http://doi.org/10.22212/JEKP.V4I2.50>
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1–12.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DA, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Prestasi*, 9(1), 113–133.
- Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 1–11.